



**Pemerintah Kabupaten
Kutai Kartanegara**

R-LPPD Tahun 2023

**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah**

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara





RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2023

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) adalah informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

RLPPD merupakan rangkuman dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 yang disampaikan Kepala Daerah kepada masyarakat diharapkan memperoleh masukan dan saran peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di tahun mendatang.

RLPPD ini memuat:

- a. Capaian Kinerja Makro;
- b. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar;
- c. Hasil EPPD dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya;
- d. Ringkasan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah; dan
- e. Inovasi Daerah.

1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang

diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro meliputi indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan ketimpangan pendapatan. Adapun Capaian Kinerja Makro yang diperoleh Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2023 sebagai berikut:

Table 1. Capaian Indikator Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Laju Kinerja
1	Indeks Pembangunan Manusia	75,31	75,95	0,850%
2	Angka Kemiskinan	7,96	7,61	-4,397%
3	Angka Pengangguran	4,14	4,05	-2,174%
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,7	5,13	38,649%
5	Pendapatan Perkapita	322,08	270,72	-15,946%
6	Ketimpangan Pendapatan (gini ratio)	0,269	0,284	5,576%

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023

2. Capaian Kinerja Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Capaian Kinerja Urusan Wajib Pelayanan Dasar merupakan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Urusan Wajib Pelayanan Dasar berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2.1. Urusan Pendidikan

A. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai berikut:

Table 2. Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023
1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	94,67	81,85
1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	98,41	98,80
1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	86,07	84,28
1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	66,71	79,42

Sumber : elppd.kemendagri.go.id

B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi belanja urusan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 senilai Rp.1.859.820.406.337,16 atau sebesar 83,02% dari pagu anggaran Rp.2.240.130.000.000,00.

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk pelaksanaan urusan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Banyaknya perpindahan penduduk baik dari luar Kalimantan Timur Khususnya Kab. Kutai Kartanegara
- 2) Masih rendahnya pemenuhan prasarana khususnya ruang kelas baru untuk menampung siswa baru
- 3) Luasan Geografis yang menyebabkan belum pemenuhan ketersediaan unit sekolah baru pada daerah-daerah tertentu
- 4) Sebaran penduduk pada desa atau kelurahan yang tidak merata
- 5) Meningkatnya angka anak putus sekolah umur 13-15 tahun sebanyak 886 warga tahun 2023 disebabkan berbagai faktor, diantaranya faktor ekonomi, faktor lingkungan dan lain-lain.

2.2. Urusan Kesehatan

A. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai berikut:

Table 3. Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	1,08	1,07
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100,00	100,00
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	91,96	91,36
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	94,53	95,46
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	97,24	93,13
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	84,39	87,66
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00	99,01
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	91,94	94,24
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	90,59	90,24
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00	100,00
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00	100,00
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00	100,00
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100,00	100,00
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00	100,00

B. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Realisasi belanja urusan Kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 senilai Rp.1.366.982.454.888,56 atau sebesar 79,56% dari pagu anggaran Rp.1.718.193.103.069,00.

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk pelaksanaan urusan Kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam upaya penambahan daya tampung di Rumah Sakit, saat ini Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara masih dalam proses pembangunan penambahan ruangan atau tempat daya tampung rumah sakit.
- 2) Kendala yang dihadapi pada pelayanan kesehatan ibu hamil antara lain:
 - a. ANC kontak pertama pada UK > 12 Minggu
 - b. 4% sasaran bumil mengalami abortus.
 - c. Belum optimalnya laporan jejaring faskes Puskesmas (PMB, Klinik, Praktek Obgyn).
 - d. Akses sulit terutama Puskesmas Zona Hulu (Tabang, Ritan, Kembang Janggut) dan wilayah Sungai Meriam (Sepatin, Muara Pantuan).
 - e. Menunda ANC dengan alasan tidak ada keluhan atau sudah urut dengan Dukun Kampung
- 3) Kendala yang dihadapi pada pelayanan kesehatan ibu bersalin antara lain:
 - a. 1% persalinan dilakukan oleh Dukun Kampung atau Keluarga dan 1% persalinan Nakes di Non Faskes
 - b. Persalinan di luar wilayah Kabupaten yang tidak terdata atau loos data oleh Petugas

- 4) Kendala yang dihadapi pada pelayanan kesehatan bayi baru lahir antara lain:
 - a. 9,1% bayi baru lahir dengan BBLR dan bayi tidak bugar (SC, Asfiksia, BBLR/Prematur tidak memungkinkan untuk IMD).
 - b. 0,7% bayi baru lahir tidak sampai kontak KN Lengkap karena meninggal.
 - c. 1% persalinan oleh Dukun Kampung/Keluarga.
 - d. Kesenjangan 6,9% pada kunjungan KN lengkap.
- 5) Kendala yang dihadapi pada pelayanan kesehatan balita antara lain:
 - a. Tidak timbang BB setelah vaksinasi lengkap atau hanya timbang pada bulan pemberian tablet Vitamin A.
 - b. Belum optimalnya laporan jejaring faskes Puskesmas (PMB, Klinik, Praktek Sp.A)
 - c. Orangtua Bekerja, sehingga belum ada waktu untuk menuju Fasyankes.
- 6) Kendala yang dihadapi pada pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar antara lain yaitu Sebagian kecil sasaran remaja diluar sekolah tidak kontak di Posyandu Remaja atau Fasyankes.
- 7) Kendala yang dihadapi pada pelayanan kesehatan usia 15-59 tahun antara lain:
 - a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin
 - b. Adanya keengganan sasaran untuk dilakukan pemeriksaan IVA Tes pada kelompok wanita usia 30-50 tahun yang sudah menikah atau yang sudah pernah melakukan hubungan seksual dikarenakan harus diperiksa gynaekologis
 - c. Masih kurang kapasitas pengelola program
- 8) Kendala yang dihadapi pada pelayanan kesehatan lansia tahun antara lain:

- a. Estimasi sasaran terlalu besar.
- b. Tidak ada yang mengantar ke Fasyankes atau ke Posyandu.
- c. Sebagian besar Puskesmas tidak ada Poli Lansia (waktu antri lama)

2.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai berikut:

Table 4. Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Tidak Ada Kewenangan Wilayah Sungai	Tidak Ada Kewenangan Wilayah Sungai
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Tidak Ada Kewenangan Wilayah Sungai	Tidak Ada Kewenangan Wilayah Sungai
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	43,06	64,08
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	76,68	82,17
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	76,14	83,48
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	98,64	100
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	61,49	65,49
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	2,58	3,9

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100,00	99,83

B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Realisasi belanja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 senilai Rp.1.314.913.031.093,00 atau sebesar 76,03% dari pagu senilai Rp.1.729.359.439.187,00.

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak adanya akses untuk material dan peralatan menuju lokasi kegiatan sehingga pekerjaan terhambat
- 2) Koordinasi dengan pihak penerbit PBG (DPMPTSP) masih belum optimal terkait waktu pelaksanaan pemeriksaan bangunan gedung yang telah terbit IMB/PBG nya
- 3) Pemohon kebanyakan tidak merespon saat dilakukan pemeriksaan bangunan
- 4) Permohonan PBG dilakukan pemohon untuk proses administrasi jual beli, bangunan yang akan diperiksa sudah berpindah tangan, sehingga koordinasi kurang lancar
- 5) Beberapa PBG yang terbit belum dilakukan pembangunan
- 6) Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi, target yang dicapai di tahun 2023 adalah 100% tanpa kecelakaan tetapi pada kenyataannya telah terjadi 1 kecelakaan di lokasi pekerjaan. Hal tersebut memerlukan perhatian dinas yang membidangi Sub Urusan Jasa Konstruksi untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan tentang permen PUPR tentang K3 Konstruksi yang didampingi oleh Ahli K3 Konstruksi.

- 7) Beberapa Kegiatan Konstruksi juga tidak banyak yang melaporkan di pekerjaannya ada / tidaknya kecelakaan konstruksi, yaitu dengan membuat papan informasi kecelakaan kerja.
- 8) untuk Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi, di target RPJMD tahun 2023 sebesar 13.24% hal tersebut dikarenakan pembilangnya di renstra adalah data tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi pembaginya adalah data survey di kecamatan/kelurahan/desa tentang masyarakat yang bekerja di bidang konstruksi yang belum memiliki sertifikat. jadi dibandingkan dengan capaian tahun ini yang cuma berada di 3.92% adalah perbedaan cara perhitungan antara pembilang dan pembaginya yaitu data tenaga operator/teknisi atau analisis yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi data dari Disnakertrans yaitu jumlah masyarakat yang bekerja di dunia konstruksi.

2.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

A. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023
1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Tidak Ada Terjadi Bencana	Tidak Ada Terjadi Bencana
2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	42,55	100
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Tidak Ada Wilayah Kumuh menjadi Kewenangan Pemda	45,87
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	6,96	2,89

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100,00	100

Sumber : elppd.kemendagri.go.id

B. Realisasi Belanja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Realisasi belanja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 senilai Rp.678.577.589.168,16 atau sebesar 90,38% dari pagu anggaran senilai Rp.750.831.314.137,00.

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk pelaksanaan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Validasi data perumahan dan permukiman (Data Perumahan berupa dokumen RP3KP masih dalam proses revidi oleh Balai Penyediaan Perumahan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur)
- 2) Validasi dan sinkronisasi data calon penerima bantuan yang melibatkan stakeholder/pihak-pihak terkait
- 3) Penetapan calon penerima bantuan memerlukan proses/waktu yang tidak sebentar dan diperlukan data dukung yang harus dilengkapi sebagai syarat pengajuan permohonan
- 4) Adanya Pembagian kewenangan antara pusat, provinsi dan kabupaten
- 5) Developer belum menyerahkan aset PSU kepada Pemkab Kukar

2.5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

A. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian kinerja urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum (trantibum) yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai berikut:

Table 5. Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Trantibum

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100,00	68,96
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	34,69	75
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1,34	76,26
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0,06	0,09
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	99,82	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	78,33	91,48
7	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	13,17	11,04

Sumber : elppd.kemendagri.go.id

B. Realisasi Belanja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Realisasi belanja urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 senilai Rp.199.028.740.243,00 atau sebesar 93,25% dari pagu anggaran senilai Rp.213.442.826.143,00.

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk pelaksanaan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Penentuan target penerima layanan informasi rawan bencana belum akurat, tidak ada prioritas (Jenis dan Kelas bencana) serta metode sosialisasi bersifat konvensional

- 2) Terbatasnya sumberdaya Aparatur dalam pelaksanaan sosialisasi
- 3) Pemasangan papan rambu bencana masih terbatas.
- 4) Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana masih kurang
- 5) Belum tersedianya sistem peringatan dini terhadap bencana (EWS)
- 6) Keterbatasan peralatan penyelamatan diri bagi masyarakat dan petugas
- 7) Belum semua jenis bencana tersusun Dokumen Kontinjensi (Renkon)
- 8) Belum terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Kabupaten dan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana)
- 9) Data penduduk dikawasan rawan bencana belum tersusun
- 10) Keterbatasan jumlah petugas dan relawan yang terlatih.
- 11) Keterbatasan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- 12) Belum seluruh kecamatan memiliki pos sektor pemadam kebakaran sehingga belum bisa mendekatkan layanan pemadam kebakaran pada tingkat kecamatan secara merata.
- 13) Keterbatasan jumlah dan kualitas Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran
- 14) Sumber Daya Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang masih terbatas baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
- 15) Belum semua desa/kelurahan memiliki relawan pemadam kebakaran
- 16) Kondisi geografis menyulitkan penjangkauan layanan pemadam kebakaran ke daerah terpencil

2.6. Urusan Sosial

A. Capaian Indiktor Kinerja Kunci

Capaian kinerja urusan Sosia yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai berikut:

Table 6. Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	97,63	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100,00	100

Sumber : elppd.kemendagri.go.id

B. Realisasi Belanja Sosial

Realisasi belanja urusan Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 senilai Rp.49.049.882.101,00 atau sebesar 82,42% dari pagu anggaran Rp.40.427.692.671,00.

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk pelaksanaan urusan Sosia di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan SDM Pelayanan Kesejahteraan Sosial: Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat, Penyuluh Sosial Fungsional dan Penyuluh Sosial Masyarakat sementara kondisi geografis Kabupaten Kutai Kartanegara sangat luas
- 2) Masih belum optimalnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam usaha kesejahteraan sosial
- 3) Masih belum optimalnya ketersediaan data kesejahteraan sosial

- 4) Kejadian bencana yang sulit diprediksi sehingga untuk menghitung kebutuhan bantuan makanan dan sandang serta bahan logistik lainnya agak sulit
- 5) Sarana prasarana pelayanan kesejahteraan pada Dinas Sosial masih belum mencukupi

3. Hasil EPPD dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

3.1. Hasil EPPD Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.1.7-6646 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kabupaten/Kota Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan skor kinerja 3,1135 dan status kinerja Sedang.

3.2. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

Berdasarkan opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 31 Desember 2022 dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

4. Ringkasan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara *unaudited* Tahun 2023, Realisasi Pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 mencapai Rp.7.787.056.066.372,93 dan

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 sebesar Rp.10.191.450.801.108,88.

Rincian realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Table 7. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	690.436.231.591,00	655.764.404.370,84	94,98%
	Pajak Daerah	130.000.000.000,00	141.989.017.504,00	109,22%
	Retribusi Daerah	10.010.000.000,00	6.282.211.585,00	62,76%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	70.000.000.000,00	63.147.803.556,59	90,21%
	Lain-lain PAD yang Sah	480.426.231.591,00	444.345.371.725,25	92,49%
2	Pendapatan Transfer	8.388.389.577.043,00	7.123.560.933.602,09	84,92%
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	7.513.909.520.968,00	6.258.065.057.225,09	83,29%
	Dana Perimbangan	7.327.005.087.968,00	6.038.157.870.225,09	82,41%
	Dana Insentif Daerah (DID)	-	27.486.716.000,00	0,00%
	Dana Desa	186.904.433.000,00	192.420.471.000,00	102,95%
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	874.480.056.075,00	865.495.876.377,00	98,97%
	Pendapatan Bagi Hasil	836.360.056.075,00	827.375.876.377,00	98,93%
	Bantuan Keuangan	38.120.000.000,00	38.120.000.000,00	100,00%
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	10.037.728.400,00	7.730.728.400,00	77,02%
	Pendapatan Hibah	5.874.000.000,00	3.567.000.000,00	60,73%
	Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perpu	4.163.728.400,00	4.163.728.400,00	100,00%
Total		9.088.863.537.034,00	7.787.056.066.372,93	85,68%

Table 8. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi	6.575.819.904.019,00	5.796.772.567.219,72	88,15%

No	Uraian	Target (RP)	Realisasi (Rp)	%
	Belanja Pegawai	1.918.078.141.093,00	1.684.529.154.471,75	87,82%
	Belanja Barang dan Jasa	4.287.299.088.914,00	3.795.475.174.146,97	88,53%
	Belanja Hibah	307.947.000,00	64.400.000,00	20,91%
	Belanja Bantuan Sosial	323.784.307.012,00	275.810.463.601,00	85,18%
2	Belanja Modal	46.350.420.000,00	40.893.375.000,00	88,23%
	Belanja Modal Tanah	4.313.313.820.198,00	3.513.607.650.991,16	81,46%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.611.437.524,00	48.525.311.811,00	66,83%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.450.734.766.845,00	1.186.122.189.231,00	81,76%
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.064.305.084.902,00	884.289.334.911,00	83,09%
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.674.059.321.660,00	1.351.028.784.039,16	80,70%
	Belanja Modal Aset Lainnya	48.883.651.994,00	42.977.977.499,00	87,92%
3	Belanja Tidak Terduga	2.719.557.273,00	664.053.500,00	24,42%
	Belanja Tidak Terduga	21.326.871.826,00	-	0,00%
4	Belanja Transfer	21.326.871.826,00	-	0,00%
	Belanja Bantuan Keuangan	878.665.403.957,00	881.070.582.898,00	100,27%
Total		11.789.126.000.000,00	10.191.450.801.108,90	86,45%

Table 9. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2023

No	Uraian	Target (RP)	Realisasi (Rp)	%
1	Penerimaan Pembiayaan	2.806.136.462.966,00	2.806.098.684.282,92	100,00%
	- Sisa lebih perhitungan pembayaran tahun sebelumnya	2.806.136.462.966,00	2.806.098.684.282,92	100,00%
2	Pengeluaran Pembiayaan	105.874.000.000,00	105.874.000.000,00	100,00%
	- Penyertaan Modal Daerah	105.874.000.000,00	105.874.000.000,00	100,00%
Pembiayaan Netto		2.700.262.462.966,00	2.700.224.684.282,92	100,00%

5. Inovasi Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 77 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah, penerapan inovasi daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki inovasi daerah sebagai berikut:

Table 10. Inovasi Daerah

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Judul Inovasi Daerah	Keterangan
1.	Desa Muara Enggelam Kecamatan Muara Wis	Kelola Listrik Komunal Muara Enggelam (KLIK ME)	
2.	Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu	Kemitraan BUMDesa dan Masyarakat Desa Sungai Payang (MABUK KEPAYANG)	
3.	Desa Loh Sumber Kecamatan Loa Kulu	Solusi Pertanian BUMDesa Sumber Purnama (SINAR PURNAMA)	
4.	Desa Batuah Kecamatan Loa Janan	Gerakan Merdeka Air Bersih Lewat PAMSIMAS (GEMERLAP)	
5.	Desa Kota Bangun III Kecamatan Kota Bangun	Desa Ramah Anak Idaman (DRAMA IDAMAN)	
6.	Desa Muara Enggelam Kecamatan Muara Wis	Forum Peduli Masyarakat Sehat (FPMS) Tulak Becari	
7.	Desa Saliki Kecamatan Muara Badak	Water Supply Sistem (WSS) Desa Saliki	
8.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rumah Besar Pengentasan Kemiskinan (RBPK)	
9.	Badan Pendapatan Daerah	SI PAIJOL BETINJAK	
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Layanan Online	
11.	Dinas Kesehatan	Indeks Rujukan	
12.	Dinas Kesehatan	Skrining Kasus dan Deteksi Dini Pre-Eklamsia (SRIKANDIE)	
13.	Dinas Kesehatan	e-SIK (Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas Pembantu Dan Klinik)	
14.	Puskesmas Kahala Kecamatan Kenohan	Kerakatan Bidan KanPenguling (KEBIDAN)	
15.	Puskesmas Perangat Kecamatan Marangkayu	Alarm Merah Kuning KeraPutri	
16.	Puskesmas Sangasanga Kecamatan Sangasanga	e-PANTAS	
17.	Puskesmas Sebulu I Kecamatan Sebulu	"Bestie Ku TBC (Bersama Terintegrasi Mendukung Eliminasi TBC)" Inovasi dari Puskesmas Sebulu I	

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Judul Inovasi Daerah	Keterangan
18.	Puskesmas Sungai Meriam Kecamatan Anggana	"Kampung KIA Hanter (Forum Peduli Kesehatan Ibu dan Anak Desa Handil Terusan)" Inovasi dari Puskesmas Sungai Mariam	
19.	Puskesmas Badak Baru Kecamatan Muara Badak	"Cap Jempol" Inovasi dari Puskesmas Badak Baru.	
20.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Inovasi Dagang Kemitraan (IDAMAN)	
21.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PILOTS (Pelayanan Izin Langsung On The Spots)	
22.	RSUD. DAYAKU RAJA Kota Bangun	SI IDAMAN (Sistem Informasi Interaksi Dini Maternal)	
23.	Kecamatan Samboja	Kawasan Masyarakat Pertanian Unggulan Rakyat Sejahtera Mandiri Pangan (Kampung Raja Mapan) Joglo Tani Kolong Langit	
24.	Kecamatan Sangasanga	Rumah Sampah Sementara Kecamatan Sangasanga (Russa Emas)	
25.	Kecamatan Anggana	Pelayanan Administrasi Melalui WA Kecamatan Anggana (PANDAWA NAGA)	
26.	Kecamatan Muara Jawa	PUSKESOS CENTER	
27.	Kelurahan Panji	Lahan Terbengkalai Jadi Taman Terbuka Hijau (Lentera Hijau)" Inovasi dari Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong.	
28.	Kecamatan Tenggarong	"Gerakan Mandira (Maju, Mandiri dan Sejahtera)" Inovasi dari Kelompok Wanita Tani Kecamatan Tenggarong.	

Bupati Kutai Kartanegara


Drs. Edi Damansyah, M.Si



Kabupaten Kutai Kartanegara